FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI APBD BERBASIS KINERJA (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU)

Abdul Rasyid, Ria Nelly Sari dan M. Rasuli

Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Performance-based budgeting aims to streamline, streamline and economize local revenue and expenditure budgets in budgeting. Most government organizations have not been able to implement and implement a performance-based budget and the optimal use of regional financial information systems, both provincial and district governments become the problem every year is no exception to the Government of Indragiri Hilir Regency of Riau Province.

The above issues need to be investigated on the causes with the title of research factors affecting performance-based APBD optimization. The purpose of this study to determine the influence of factors that affect the optimization of APBD-based performance. By using the method of mixed research and convergent approach of this research conduct questionnaires and interviews of respondents, the type of data used is primary and secondary data that is data obtained directly from respondents and data related to the subject of research.

Based on the results of leadership quality data test, organizational commitment, administrative improvement, resources, reward and punishment, strong desire to succeed, regional financial information system affect the optimization of revenue and expenditure budget based on performance, with significant level is 95% and error rate 5%. In the hypothesis test results that leadership variables, organizational commitment, administrative improvements, resources, rewards and punishment, strong desire to succeed, regional financial information systems affect the optimization of revenue and expenditure budget based on performance, with a significant level 95% t table (1.960) Smaller than t arithmetic.

Kata Kunci : Leadership, Organizational Commitment, Administrative Improvement, Resources, Reward and Punisment, Strong Desire to Succeed, Regional Financial Information System and Performance Based Budget.

PENDAHULUAN

Di sekitar kita terdapat begitu banyak organisasi dengan berbagai aktivitas yang berbeda mulai dari kegiatan organisasi, skala organisasi, jenis organisasi sampai ukuran organisasi beserta orientasinya. Untuk menjalankan organisasi, secara umum dan keharusan setiap organisasi membutuhkan anggaran (*budget*) terutama permodalan bagi organisasi sehingga anggaran merupakan hal sanggat penting dalam organisasi. Anggaran merupakan sesuatu hal yang diangap paling penting dalam organisasi, baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta yang orientansinya pada keuntungan. Pentingnya anggaran dalam organisasi dikarenakan anggaran memiliki fungsi utama dalam organisasi, diantaranya sebagai alat perencanaan dan alat manajemen. Sebagai alat perencanaan, anggaran akan memberikan arahan, pedoman dan standar bagi aktivitas yang akan dilakukan setiap organisasi. Sebagai alat pengendalian manajemen, anggaran akan berguna untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang akan dilakukan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal periode.

Anggaran memiliki fungsi ganda yang vital dalam organisasi, tanpa anggaran organisasi akan kehilangan arah, tolak ukur dan alat penilaian kinerja. Anggaran yang baik akan menghasilkan arah, tolak ukuran dan kinerja organisasi yang baik. Pada organisasi sektor swasta (perusahaan) anggaran yang dijadikan arah, tolak ukuran dan kinerja menjadi suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan diorganisasi sektor publik (institusi pemerintah) anggaran harus dipublikasi sebagai bentuk transparansi dengan tujuan untuk dapat diketahui, dikritik, diberi masukan dan dievaluasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik serta meningkatkan kinerja organisasi publik (pemerintah).

Untuk mewujudkan transparansi anggaran sektor publik, proses penyusunan anggarannya sering kali menjadi isu penting dan sorotan utama masyarakat, terutama berkaitan dengan realisasi anggaran, proses dan mekanisme pengesahaan anggaran yang sering terlambat, tidak sesuainya anggaran yang dibuat pemerintah dengan harapan dan keinginan masyarakat. Sorotan dan tuntutan masyarakat tersebut melahirkan evaluasi dan reformasi dibidang anggaran baik terkait dengan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Adanya evaluasi dan reformasi anggaran memberi perubahan yang cukup mendasar pada ruang lingkup anggaran terutama pada struktur anggaran (*budget structure reform*) dan perubahan proses penyusunan APBD (*budget process reform*). Perubahan struktur anggaran dilakukan untuk mengubah struktur anggaran lama (anggaran tradisional) yang bersifat *line item* dan *incrementalism*.

Perubahan struktur anggaran tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (*public accountability*). Dengan struktur anggaran yang baru (anggaran berbasis kinerja/ *performance based budgeting*) besarnya surplus dan defisit anggaran serta strategi pembiayaan apabila terjadi defisit fiskal jelas terlihat. Proses ini membuktikan bahwa reformasi anggaran dalam perubahan proses penyusunan anggaran suatu anggaran mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Jika mencermati kinerja sistem *line item budgeting,* dengan berpedoman pada serangkaian peraturan, namun tidak berdasarkan pencapian hasil kinerja. Sistem *line item budgeting,* anggarannya berfokus hanya pada *input,* yaitu dengan menekan peningkatan jumlah pagu anggaran akan tetapi tidak pada *output* dan pertimbangan prioritas kebijakan. Sistem ini menyebabkan duplikasi belanja, penumpukan dan penyimpangan anggaran. Selain itu, tidak memiliki tolak ukur yang bisa dijadikan dasar untuk mengukur kinerja. Dalam pendekatan *increm-entalism* anggaran disusun hanya dengan cara menambah atau mengurangi besar anggaran pada masing-masing item yang sudah ada dalam anggaran tahun sebelumnya. Penambahan atau penggurangan anggaran untuk masing-masing item pada umumnya hanya didasarkan kepada perkiraan proporsi perubahan total anggaran dari tahun sebelumnya ke tahun anggaran yang sedang disusun dalam jumlah rupiah per item-item anggaran sebagai dasar untuk menyesuaikan tanpa melakukan kajian yang mendalam.

Pendekatan semacam ini bukan saja tidak memberi jaminan terpenuhinya kebutuhan riil, akan tetapi, bisa mengakibatkan kesalahan terus menerus. Hal ini dikarenakan oleh pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan dasar penyusunan anggaran tahun ini belum tentu telah ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan yang wajar. Selain itu, kelemahan anggaran dengan sistem tradisional (*line item budgeting*) yaitu tidak mempertimbangkan konsep ekonomis, efisiensi dan efektif dalam penyusunan anggaran serta berpotensi menyebabkan tidak transparannya dan kurangnya akuntabiltas anggaran. Kelemahan ini memerlukan reformasi anggaran yang lebih efektif, efisien dan ekonomis yang dikenal dengan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Beralihnya sistem anggaran tradisional ke sistem anggaran berbasis kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk mengoptimal-kan pengeluaran disertai dengan efektivitas dan efisiensi anggaran sesuai dengan prioritas program dan kegiatan. Sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertang-gungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

Tujuan utama sistem ini yaitu, untuk mengefisiensikan anggaran dengan cara menghubungkan beban biaya, mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas dan kegiatan, meningkatkan kualitas pelayan publik dan merubah pradigma dari kinerja lembaga berdasarkan besar dana yang dijadikan penilaian menjadi pencapaian kinerja yang di ukur dengan indikator substansif suatu program secara efisien, efektif, dan ekonomis sejalan dengan kebijakan organisasi (BPKP, 2005)

Dalam penerapannya, anggaran berbasis kinerja dikatakan optimal, apabila dalam realisasi anggaran dapat tercapai dengan maksimal dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan serta mampu dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Akun-tabiltas kinerja suatu organisasi tercapai secara maksimal apabila perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, pengalokasian anggaran yang realistis terhadap suatu program dan kegiatan, maksimalnya persen-tase realisasi anggaran belanja dapat dievaluasi dan perbaikan setiap tahunnya. serta juga mampu meningkatkan dan memperkuat kualitas pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun tujuan penganggaran berbasis kinerja dan sistem informasi keuangan daerah bertujuan untuk mengefisiensikan, mengefektifkan, dan mengekonomiskan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penganggaran, kebanyakan organi-sasi pemerintah belum mampu melaksanakan dan menerapkan anggaran berbasis kinerja serta belum menjadikan sistem informasi keuangan daerah sebagai salah sumber utama, baik pemerintah provinsi hingga ketingkat pemerintah kabupaten atau kota. Permasalahan ini menjadi masalah rutinitas yang terjadi setiap tahun tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Belum optimalnya anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan beberapa penyebab. *Pertama*, belum optimalnya tingkat realisasi anggaran, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2016 (Rapat, 30 Desember 2016) sebesar 83,89% (goriau.com. 3 Januari 2017), Tahun Anggaran 2015 sebesar 79,97% (detikriau.org. 13 april 2016) dan Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar 79,68% (inforiau.co, 05 juni 2015).

Kedua, Belum optimalnya singkronisasi dan koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan dalam organisasi pemerintah daerah. Misalnya dalam merencanakan anggaran program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan standar bangunan dan biaya yang telah dianggarkan namun pelaksana kegiatan kurang mampu merealisasikan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Dengan kondisi seperti ini penyerapkan anggaran belum sesuai dengan rencana sehingga target dan tujuan pembangunan insfrastruktur yang berkualitas belum tercapai secara optimal. Penyebab lainnya menurut Rasyid (2013) banyaknya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan tahunan daerah yang telah terdokumentasi pada RKPD tiba-tiba hilang ditengah jalan pada saat penyusunan APBD. Padahal salah satu prinsip penganggaran adalah berbasis kinerja, yaitu menyusun anggaran didasarkan pada target kinerja yang ditetapkan terlabih dahulu (Yunarto,15: 2015) *Ketiga,* Keterlambatan dalam pengesahan APBD dan APBD Perubahan. *Keempat,* Konektivitas program kegiatan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat belum optimal (Hartati, riauterkini. com, 18 April 2016). *Kelima,* Sistem informasi keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam membantu pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan anggaran belum dimanfaatkan dengan baik dan optimal.

Belum mampu melaksanakan dan menerapkan anggaran berbasis kinerja dan pengunaan sistem informasi keuangan daerah secara optimal dengan banyak temuan-temuan fakta yang telah diuraikan di atas karena bisa jadi dikarenakan dalam penetapan besarnya jumlah alokasi anggaran lebih memper-timbangkan nilai uang (*value for money*) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (*money follow function*) sesuai dengan kebutuhan riil setiap unit kerja sehingga wajar bisa menyebabkan realisasi anggaran belum optimal. Selain itu, dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perim-bangan keuangan). Pola pertan-ggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horizontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawa-bannya hanya kepada DPRD dari pada masyarakat luas ini bisa menjadi antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan pemerintah tidak sama begitu juga dengan pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian gabungan (*mixed reseach*), yaitu yang mengabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan mengunakan pendekatan konvergen, dimana dalam pendekatan konvergen yaitu melakukan dua pendekatan berdasarkan pada metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu falsafah asosiatif dan pendekatan kualitatif yaitu diskriptif.

Pendekatan penelitian ini berupaya mengali faktor-faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja sekaligus menguraikan, mendiskripsikan masing-masing penga-ruh faktor terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja.

Menurut Anggraini dan Puranto (2010:101) anggaran berbasis kinerja yang baik akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelola program secara efektif. Berdasarkan pengertian diatas selanjutnya dalam penelitian ini optimalisasi anggaran berbasis kinerja yaitu dalam rangka mengoptimalkan penganggaran yang bertujuan untuk mengefisiensikan, mengefektifkan, dan mengekonomiskan anggaran berdasar-kan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen pernyataan pada penelitian ini terdiri dari 9 butir dengan mengunakan skala ukuran likert.

Menurut Hasibuan (2008:170) kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk memcapai tujuan organisasi. Dengan memodifikasi pengertian tentang kepemimpinan dapat diartikan bahwa kepemimpinan merupakan seni atau proses untuk memotivasi, mempengaruhi, mengkoordinasi, memberi dorongan, perintah dan bimbingan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan kemauan dan antusias tanpa adanya paksaan pada penyempurnaan pedoman pengelolaan APBD, meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan, mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya, mengarahkan penerapan peraturan dalam bekerja. Instrumen pernyataan dalam penelitian ini ada 7 butir dengan skala ukuran likert.

Menurut Simanjuntak yang dikutip Azhar (2007) komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Dengan memodifikasi pengertian komitmen maka instrumen yang dijadikan komitmen dalam penelitian ini yaitu kemauan dan kesiapan menjalankan visi dalam segala tindakan guna mencapai misi organisasi, memfokuskan diri pada tujuan organisasi, kemauan dan kesiapan mencapaian sasaran, bersedia menghadapi resiko dalam mencapai tujuan organisasi, menerima penghargaan atas prestasi yang telah dibuat. Instrumen tersebut terdiri dari 8 butir penyataan dengan alat ukur skala likert. Menurut Siagian (2008) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan memodifikasi pengertian dan permasalahan administrasi yang dimaksud dengan penyempurnaa administrasi yaitu perbaikan serta melengkapi atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penerapan administrasi sebuah organisasi. Instrumen pernyataan dalam penelitian ini ada 7 butir dengan skala ukuran likert. Menurut Mahmudi (2005:187-191) *reward* adalah penilaian yang bersifat positif terhadap pegawai. Menurut Mangkunegara (2000:130) *punishment* adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan, pelanggan, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Dengan memodifikasi pengertian *reward* dan *punishment* maka instrumen pernyataan dalam penelitian ini ada 6 butir pernyataan dengan mengunakan skala ukur likert.

Keinginan kuat untuk berhasil merupakan hal tidak bisa dilepaskan dari motif dan dorongan seseorang untuk melakukannya. Dalam hal ini perlu dilihat motif dan dorongannya tersebut atau yang dikenal dengan motivasi. Menurut Micthel (1997) motivasi merupakan sebuah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mecapai tujuan. Berdasarkan pada pengertian motivasi yang merupakan salah faktor yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan maka pengertian keinginan kuat untuk berhasil dapat diartikan adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan yang dianggap mencapai keberhasilan. Keinginan yang kuat untuk berhasil guna mengoptimalisasi APBD berbasis kinerja yaitu keinginan kuat perbaikan serta penyempurnaan sistem dan prosedur administrasi, penerapan komitmen, koordinasi dan singkronisasi dalam kerja sama. Instrumen dalam penelitian ini terdiri 4 butir dengan mengunakan skala ukur likert.

Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan memodifikasi pengertian sistem informasi keuangan daerah maka sistem informasi keuangan daerah dalam penelitian ini adalah menyusun rancangan dan penyempurnan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan anggaran, menyusun Pertanggungjawaban, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan Laporan keuangan dan fisik kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah daerah serta menilai program dan kegiatan yang dilakukan apakah sudah ekonomis, efisien dan efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi APBD berbasis Kinerja

Pada penelitian ini indikator kepemimpinan yang dijadikan ukuran untuk menilai pengaruhnya terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja yaitu peran seorang pemimpin (kepemimpinan) dalam mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi bawahannya. Berdasarkan pada hasil penelitian dengan mengunakan metode kuantitatif diketahui bahwa instruksi terhadap penyempurnaan pelaksanaan pedoman yang sesuai dengan aturan dan perundangan, peningkatan kapasitas ASN melalui bimbingan teknis sesuai tupoksi, mendorong dan memotivasi pengunaan sumber daya yang ada, mengarahkan mempedomani aturan yang berlaku, mengarahkan pada prioritas kebijakan, dan membagi tugas ASN sesuai tupoksi dalam penyusunan dan pengelolaan APBD memiliki pengaruh positif tehadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Nilai *R-square* yang diperoleh berdasarkan pengujian terhadap kepemimpinan dengan mengunakan program *SmartPLS*, pengaruh kepemiminan (K) terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 42,1%. Ini berarti bahwa kepemimpinan dalam organisasi pada Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pengaruh positif tehadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja.

Hasil penelitian dan analisa diperoleh dari kegiatan wawancara dan penelaahannya. Secara umum hasil wawancara yang telah dilakukan terkait dengan ukuran peran kepemimpin dalam mengoptimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja sama dengan ukuran penilaian pada metode kuantitatif dengan para informan menunjukan bahwa peran kepemimpinan dalam memberikan instruksi terhadap penyempurnaan pelaksanaan pedoman yang sesuai dengan aturan dan perundangan, peningkatan kapasitas ASN melalui bimbingan teknis sesuai tupoksi, mendorong dan memotivasi pengunaan sumber daya yang ada, mengarahkan mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengarahkan pada prioritas kebijakan, dan membagi tugas ASN sesuai tupoksi dalam penyusunan dan pengelolaan APBD sangat dibutuhkan guna mecapai dan mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja

Hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan ukuran komitmen yang mampu atau tidaknya mempengaruhi optimalisasi anggaran pendapat dan belanja daerah berbasis kinerja diantaranya tanggungjawab pegawai terhadap capain yang harus dilaksanakan, prioritas visi dan misi, dan fokus dalam melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi. Pengujian terhadap komitmen organisasi dengan mengunakan program *SmartPLS*, diperoleh pengaruh komitmen organisasi (KO) terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 37.2 %.

Ini berarti bahwa komitmen organisasi dalam bentuk tanggungjawab pegawai terhadap capain yang harus dilaksanakan, prioritas pada visi dan misi, dan fokus dalam melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi berpengaruh secara positif. Pada bagian pengujian dengan metode kualitatif mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja dengan indikator komitmen organisasi yang sama diperoleh hasil penelitian dan analisanya. Dalam analisa dengan pendekatan metode kualitatif (wawancara) mengambarkan bahwa secara umum ada kesamaan jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh para informan mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja. Kencenderungan informan manyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja.

Pengaruh Penyempurnaan Administ-rasi terhadap Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja

Hasil pengujian dan analisa yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel penyempurnaan administrasi terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja baik dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Peran penyempurnaan administ-rasi terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja dengan pendekatan kuantitatif terlihat dengan jelas bahwa variabel penyempurnaan administrasi mampu mempengaruhi optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mana besar pengaruh variabel penyempurnaan administrasi mampu mempengaruhi optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 43,2%.

Pengujian dengan metode kualitatif juga memberikan gambaran mengenai peran atau pengaruh penyempurnaan admimistrasi terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengaruh Sumber Daya terhadap Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja

Pada penelitian ini menjelaskan peran sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber dana maupun teknologi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian dengan mengunakan metode kuantiatif terkait dengan peranan sumber daya manusia, dana dan teknologi dalam pengoptimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pada hasil pengujian dengan metode kualitatif, berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan didapat adanya indikasi kecenderugan dalam memberikan jawaban, kecenderungan para informan menyatakan bahwa reward dan punishment memiliki kaitan erat dengan kinerja pada organisasi dan ini juga sudah barang tentu kaitannya juga dengan kinerja APBD berbasis kinerja.

Pengaruh *Reward* dan *Punishment* terhadap Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja

Hasil analisa dan pembahasan mengenai peran atau pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel *reward* dan *punishment* terhadap variabel optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja baik dengan mengunakan metode kuantitatif dan pengujiannya mengunakan program *SmartPLS,* diperoleh pengaruh *reward* dan *punishment* terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebesar 43,5 %. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel *reward* dan *punishment* memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja. Dalam pemberian *reward* dalam bentuk peluang dan kesempatan peningkatan karir dan pemberian tambahan penghasilan bagi yang berprestasi mampu mendorong pegawai untuk mempersembahkan pekerjaan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin sedangkan *punishment* yang diberikan dalam bentuk mutasi jabatan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, pemotongan penghasilan, pembebasan jabatan dan demosi mampu memberikan stimulan pada para karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atas pekerjaanya dengan lebih berhati-hati dan melaksanakan dengan disiplin semaksimal mungkin agar sanksi jangan sampai dijatuhkan.

Pengaruh Keinginan Kuat Untuk Berhasil terhadap Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah Berbasis Kinerja

Hasil analisa dan pembahasan mengenai peran atau pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel keinginan kuat untuk berhasil terhadap variabel optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja dengan mengunakan metode kuantitatif dan pengujiannya mengunakan program *SmartPLS,* diperoleh pengaruh keinginan kuat untuk berhasil terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebesar 44,1%. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel keinginan kuat untuk berhasil memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja.

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Optimalisasi APBD berbasis Kinerja

Hasil pengujian metode kuantitatif dengan mengunakan program *SmartPLS*, diperoleh peran atau pengaruh yang diberikan oleh sistem informasi keuangan daerah terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebesar 39.1%. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel sistem informasi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja. Pengujian dengan metode kualitatif, hasil penelitian memberikan gambaran mengenai peran atau pengaruh yang berikan oleh sistem informasi keuangan daerah terhadap optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi APBD berbasis kinerja (studi empris pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau) diketahui bahwa kepemimpinan, komitmen organisasi, penyempurnaan administrasi, sumber daya, *reward* dan *punishment*, keinginan kuat untuk berhasil, sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, maka disarankan agar :

1. Dalam menentukan dan menetapkan pemimpin baik itu bentuk dan gaya kepemimpinan, secara spesifik mencari seorang pemimpin yaitu yang memahami konsep anggaran secara baik, agar optimalisasi anggaran dapat diwujudkan dan secara umum memahami segala bidang agar dalam memberi dorongan, motivasi dan pengarahan mampu dipahami bawahan.
2. Komitmen organisasi merupakan modal untuk membangun organisasi yang baik. Karena dengan adanya komitmen melahirkan kebulatan tekad dalam mengapai sesuatu termasuk optimalisasi anggaran.
3. Penyempurnaan administrasi adalah perbaikan atas kesalahan, penambahan atas kekurangan dan pengurangan atas overtivitas administrasi. Untuk itu, penyempurnaan administrasi sesuatu yang dianggap perlu dan harus bagi setiap organisasi agar sistem dan prosedur mampu memaksimalkan kinerja organisasi.
4. Keterkaitan dengan sumber daya manusia dan dana dalam organisasi merupakan sumber vital organisasi tanpa kedua hal tersebut organisasi akan lumpuh.
5. *Reward* dan *punishment* merupakan sebuah instrumen yang dimiliki oleh organisasi untuk mendorong, mengerakan dan menekan kinerja. Untuk itu, organisasi dituntut untuk memberikan kepastian *reward* yang jelas dan wajar serta ketegasan dalam memberikan sanksi harus dimiliki setiap organisasi.
6. Pegawai yang memiliki keinginan kuat untuk berhasil cenderung memiliki optimisme untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang maksimal. Pegawai yang memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk berhasil sudah barang tentu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki demi tercapai tujuan.
7. Sistem informasi keuangan daerah merupakan informasi terkait dengan keuangan daerah. Dengan memahami dan memperoleh informasi keuangan daerah baik dari sisi pendapatan dan pembelanjaan tentu akan menjadi acuan pertimbagan yang tepat. Untuk itu, dalam membuat penganggaran organisasi informasi keuangan harus terlebih dahulu ada agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Aziz dkk, 2016, *Pengaruh Evaluasi dan Kejelasan Anggaran Sasaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKP Aceh di Pemerintahan Aceh,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.16. No. 1.

Abd Rasyid, 2013, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Singkronisasi Dokumen Rencana Anggaran Kerja Pemeritah Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,* Jurnal Future Vol. 1 No. 1.

Ade Hartati Rahman, *Wakil Rakyat di DPRD Riau Minta Konektivitas Program Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat,* (On-line), http://*www.riauterkini.com,* Diakses, 25 Oktober 2016.

Adi, *Bupati Inhil Serahkan LKPJ Tahun Anggaran 2015 Ke DPRD,* (On-line), https://*detikriau.org/2016/04/13*. Diakses, 24 Oktober 2016.

Anwar Prabu A.A Mangkunegara, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,* Edisi Revisi Bandung: PT. Remaja Resdakarya.

Asrida dan M Saleh, 2014, *Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada SKPD Di Kabupaten Bireuen,* Jurnal Lentral Vol. 14 No. 1.

Bambang Nugroho, 2006, *Reward dan Punishment* Bulletin Cipta Karya, Depertemen Pekerja Umum Edisi No 6/IV/Juni 2006. Persada.

Basri Zein, 2008, *Korelasi Antara Aspek Motivasi Dalam Penyusunan Anggaran Dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kegiatan Pada Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,* Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol 1. Nomor 2.

Burhan Bungin 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif,* Edisi Revisi Jakarta:Pernada Media.

Cholifah, 2013, *Rancangan Model Efektivitas Pengunaan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Jawa Timur,* Jurnal WIGA Vol 3, Nomor 2, September 2013.

Cristine Daymon dan Immy Holloway, 2008, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications,* terjemahan Cahya Wiratama, Yogyakarta: Bentang

Deddi Nordiawan, 2007, *Akuntansi Pemerintah, Cetakan Kedua,* Jakarta: Salemba Empat.

Deddi Nordiawan, 2009, *Akuntansi Sektor Publik,* Jakarta: Salemba Empat

DeLone, W.H. and E.R.Mc Lean. 1992. *Information System Success: The Quest for the Dependent Variable*, Infomation System Research 3 (Marach)

Elly Hesrini, 2015, *Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Gersik, e*-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA Vol. 1 No. 1 Februari 2015.

Henry Simamora, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Yokyakarta: STIE YKPN.

Husien Umar, 2012, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial,* Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

Hariyadi, 2015, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Berbasis Kinerja (Studi Empiris di SMK Negeri Se Kota Madium),* ASSET: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No. 1.

Iskandar, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kuantitaif dan Kualitatif,* Jakarta: Gaung Persada Press.

Iqbal Hasan, 2012. *Pokok-Pokok Statistik, Jilid dua, Edisi Revisi* Jakarta: Erlangga.

Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Indriani Yulia Friska, 2015, *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Jambi):* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi Vol. 1 No. 1.

Imam Yunarto, 2015, *Memahami Proses Penganggaran Untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran,* Jurnal Jurnal Paris Review.

John W.CresWel, 2016, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Cetakan I,* Yogyakarta, Pustaka.